



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

JALAN SUTOYO NOMOR 1, TANJUNG SELOR 77211
TELEPON (0552) 2034598, Email: kanwildjpb.kaltara@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : ND- **417** /WPB.21/2019

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2019
Tanggal : 12 November 2019

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2019 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara. *Softcopy* KFR tersebut telah kami kirimkan ke alamat *email* ditpa@kemenkeu.go.id dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah,


Iman Santosa



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN III
2019

Penyusun :

Penanggung Jawab : Midden Sihombing | Ketua Tim : Mustriyono |
Tim Penyusun : Sri Kuncoro Herlambang | Moch. Ichsan
Arditriansyah | Maharrucha Zakka | Fahmi Mustafa

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	3
C. Indikator Kesejahteraan	4
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	6
A. Pendapatan Negara.....	6
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	13
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	14
A. Pendapatan Daerah.....	15
B. Belanja Daerah	21
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun	22
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	23
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	23
B. Pendapatan Konsolidasian.....	23
C. Belanja Konsolidasian	25
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	27
V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH	28





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

JALAN SUTOYO NOMOR 1, TANJUNG SELOR 77211
TELEPON (0552) 2034598, Email: kanwildjpb.kaltara@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : ND- **417** /WPB.21/2019

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2019
Tanggal : 12 November 2019

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2019 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara. *Softcopy* KFR tersebut telah kami kirimkan ke alamat *email* ditpa@kemenkeu.go.id dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah,


Iman Santosa



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



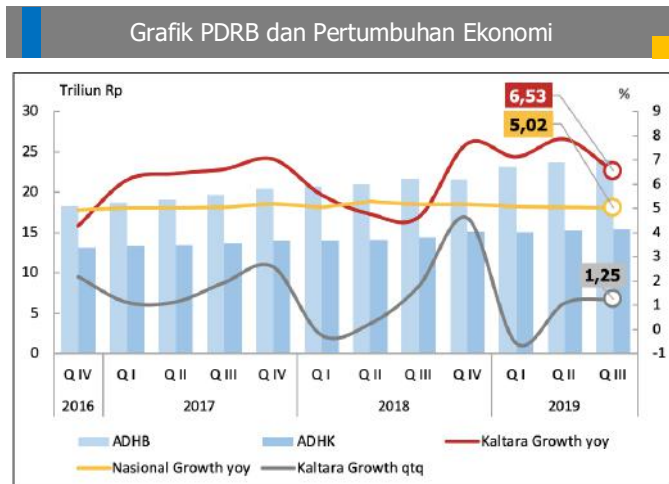
TRIWULAN III
2019

Penyusun :

Penanggung Jawab : Midden Sihombing | Ketua Tim : Mustriyono |
Tim Penyusun : Sri Kuncoro Herlambang | Moch. Ichsan
Arditriansyah | Maharrucha Zakka | Fahmi Mustafa

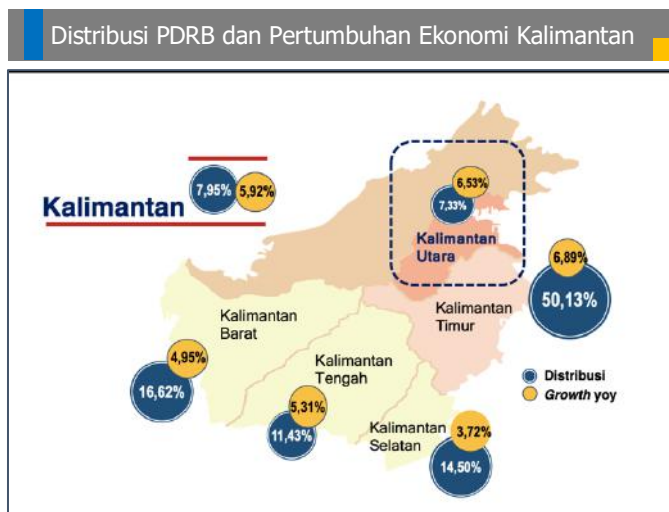
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Kinerja perekonomian provinsi Kalimantan Utara pada triwulan III 2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,53% dari periode yang sama tahun lalu. Meski melambat dibandingkan periode triwulan sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih tercatat di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Bila dibandingkan dengan periode triwulan II 2019 (qtq) kinerja perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan III juga tercatat tumbuh positif sebesar 1,25%. Tingkat pertumbuhan (yoy) yang tercatat pada periode pelaporan menghasilkan angka Nominal PDRB berdasarkan ADHB kembali meningkat menjadi sebesar Rp24,04 triliun dan berdasarkan ADHK tercatat sebesar sebesar Rp15,42 triliun.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

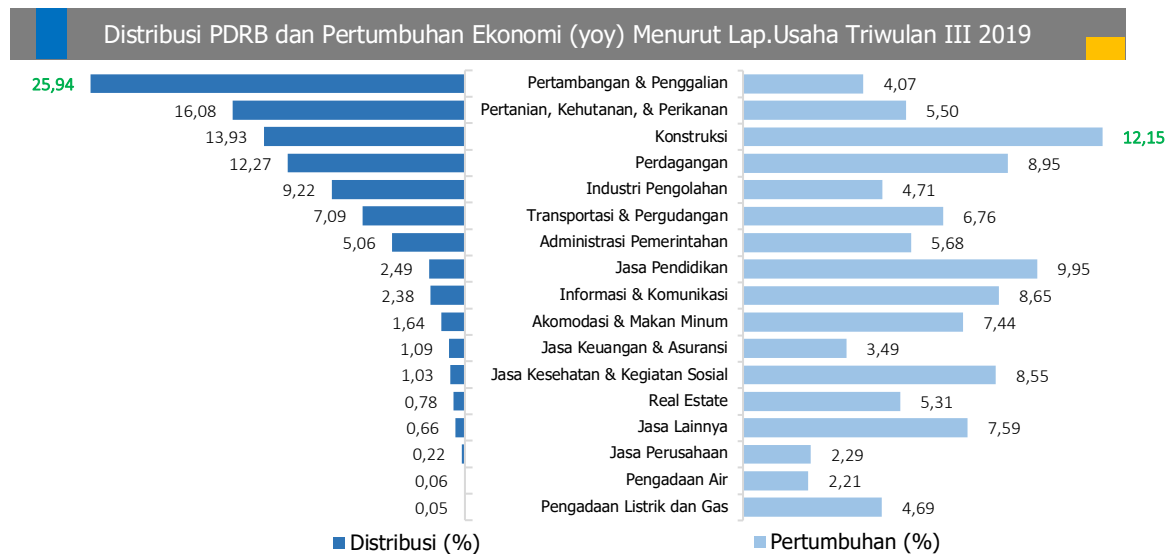
terkecil sebesar 7,33%.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi di Kalimantan Utara pada triwulan III 2019 masih menunjukkan kondisi yang sama dari periode-periode sebelumnya, dimana lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penggerak utama

Kinerja perekonomian provinsi Kalimantan Utara pada triwulan III 2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,53% dari periode yang sama tahun lalu. Meski melambat dibandingkan periode triwulan sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih tercatat di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Bila dibandingkan

Secara spasial di Pulau Kalimantan, tingkat pertumbuhan ekonomi (yoy) Kalimantan Utara tidak lagi menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan mengingat Kalimantan Timur dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,89% kali ini tercatat sebagai yang tertinggi. Adapun kontribusi PDRB Kalimantan Utara terhadap perekonomian di regional Kalimantan masih menjadi yang

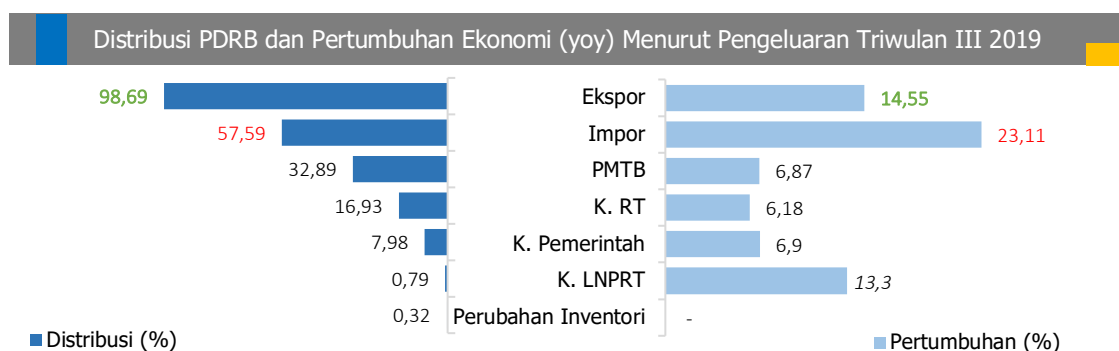
perekonomian dengan andil sebesar 25,94 persen terhadap total PDRB. Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, semua sektor mengalami pertumbuhan, dimana lapangan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

usaha konstruksi mencatatkan tingkat pertumbuhan yang tertinggi sebesar 12,15%, diikuti oleh lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 9,95% serta lapangan usaha perdagangan sebesar 8,95%.

Bila ditinjau dari andil lapangan usaha terhadap tingkat pertumbuhan pada periode pelaporan, lapangan usaha konstruksi juga memberikan kontribusi yang tertinggi sebesar 1,47% disusul kemudian lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Perdagangan dengan andil masing-masing sebesar 1,14% dan 0,97%. Kinerja positif lapangan usaha Konstruksi didorong oleh meningkatnya penjualan semen dan batu bata seiring dengan pembiayaan kegiatan fisik Pemerintah yang mulai terealisasi menjelang akhir tahun anggaran.

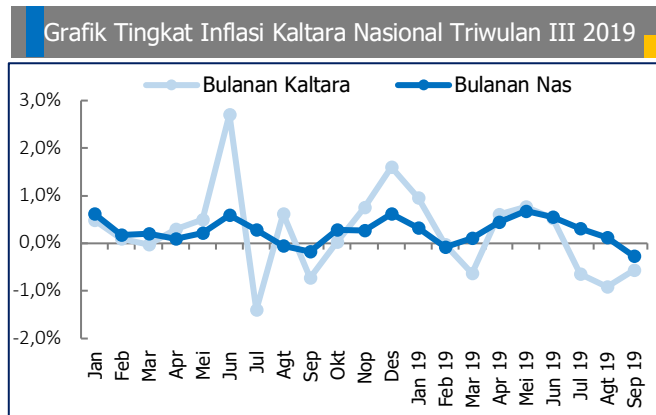


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDRB Kalimantan Utara pada periode triwulan III 2019 tercatat mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun

lalu. Adapun sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan III 2019 berasal dari kinerja komponen Ekspor dengan andil sebesar 13,06% diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 2,08% terhadap angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Kinerja Ekspor ditopang oleh ekspor antar daerah yang meningkat meskipun ekspor luar negeri mengalami penurunan yang dipicu oleh penurunan produksi komoditas utama untuk tujuan ekspor.

B. Inflasi



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Sepanjang triwulan III 2019, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Utara mengalami penurunan. Pada bulan Juli, deflasi yang terjadi di Kalimantan Utara tercatat sebesar -0,64% dipengaruhi oleh penurunan IHK pada kelompok Bahan Makanan sebesar -2,03% dan

kelompok Transportasi sebesar -2,32%. Kedua kelompok pengeluaran tersebut juga turut memberi andil yang paling dominan terjadinya deflasi. Adapun komoditas utama yang memiliki andil dominan menyebabkan deflasi secara berturut-turut adalah Udang Basah, Ikan Layang, Ikan Bandeng, Tomat sayur, dan Angkutan Udara

Pada medio triwulan III 2019, Indeks Harga Konsumen kembali mengalami penurunan atau menyebabkan deflasi sebesar -0,92% lebih rendah dari deflasi periode sebelumnya. Penurunan IHK tersebut masih dipengaruhi oleh penurunan IHK kelompok pengeluaran Bahan Makanan dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan masing-masing sebesar -1,03% dan -4,88%. Angkutan Utara menjadi komoditas yang paling dominan memberikan andil terhadap deflasi yang mencapai -0,69%.

Memasuki akhir triwulan, meski tidak sedalam periode sebelumnya penurunan IHK pada bulan September menyebabkan terjadinya deflasi sebesar -0,57% di Kalimantan Utara. Deflasi September terjadi karena penurunan IHK kelompok Bahan Makanan yang tercatat sebesar -2,07% serta kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,47%. Besarnya andil kelompok Bahan Makanan dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan ini menyebabkan terjadinya deflasi meskipun kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan IHK. Tingkat Inflasi tahun kalender Kalimantan Utara sampai dengan periode pelaporan tercatat sebesar 0,05% sementara Inflasi tahun

ke tahun tercatat 2,46%. Tingkat inflasi Kalimantan Utara yang tercatat hingga Juni 2019 masih berada dibawah target inflasi tahun 2019 yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,33 persen.

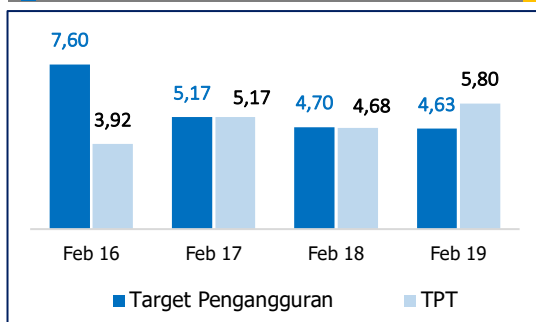
Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Triwulan III 2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Thn Kal
Bahan Makanan	0,59	-0,63	-0,24	0,49	0,33	0,37	-0,548	-0,272	-0,548	1,00
Makanan & Minuman, Rokok & Tembakau	0,13	0,009	0,03	-0,002	0,04	0,005	0,017	0,0007	0,017	2,45
Perum, Air, Listrik, Gas & BB	-0,07	-0,03	0,02	-0,012	0,05	-0,008	0,0087	0,0258	0,012	0,72
Sandang	0,009	0,003	0,003	-0,003	0,001	0,01	0,0084	0,0138	0,0077	1,97
Kesehatan	0,02	0,002	0,01	0,010	0,03	0,001	0,020	0,0068	0,0072	4,09
Pendidikan, Rekreasi, & Ol.raga	0,003	0,000	0,000	0,00	0,00	0,01	0,194	0,0000	0,000	4,43
Transportasi & Komunikasi	0,27	0,61	-0,45	0,10	0,30	0,12	-0,338	-0,698	-0,065	7,93
Inflasi (mtm)	0,96	-0,03	-0,62	0,59	0,76	0,53	-0,64	-0,92	-0,57	0,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

C. Indikator Kesejahteraan

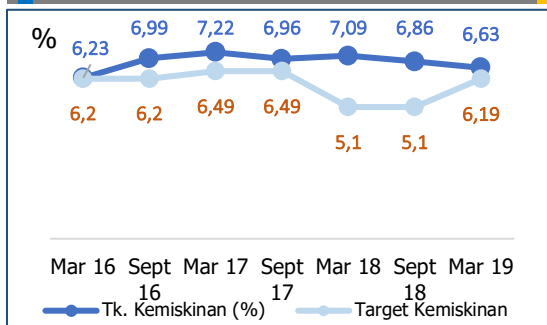
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

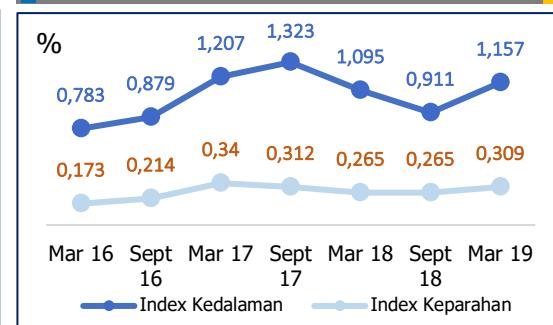
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Kaltara pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 5,80% atau sekitar 20.681 dari 356.282 orang angkatan kerja. Angka TPT ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan periode Februari 2018 yang tercatat sebesar 4,68% dan telah melampaui target pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 sebesar 4,63%. Dibandingkan dengan TPT Nasional yang mencapai 5,13%, TPT Kaltara periode ini tercatat lebih baik.

Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Grafik Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan



Selain dari sisi ketenagakerjaan, indikator pembangunan di wilayah Kalimantan Utara yang tercermin dari Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 6,86% pada

September 2018 menjadi 6,63% pada Maret 2019. Jika ditelusuri lebih mendalam, tingkat kemiskinan yang menurun dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang turun meskipun disaat yang sama penduduk miskin perkotaan justru bertambah. Karena sebagaimana diketahui jumlah penduduk miskin sebagian besar masih berada di desa, sehingga naik turunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan keseluruhan. Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kondisi penduduk Kalimantan Utara yang masih berada dibawah Garis Kemiskinan justru semakin jauh dari Garis Kemiskinan ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan. Selain itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2019 yang juga menunjukkan kenaikan dibanding periode sebelumnya menggambarkan ketimpangan diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Garis Kemiskinan pada periode Maret 2019 menunjukkan kenaikan dibanding periode sebelumnya, dimana Garis Kemiskinan Makanan memberi andil terbesar. Fenomena ini justru menunjukkan kebalikan dari perubahan indeks harga konsumen dibulan Maret 2019 yang mengalami penurunan sehingga memicu terjadinya deflasi.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, kondisi kemiskinan di regional Kalimantan Utara periode bulan September belum dapat diketahui dikarenakan data resmi terkait kemiskinan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Triwulan III 2018 -2019 (Miliar Rp)

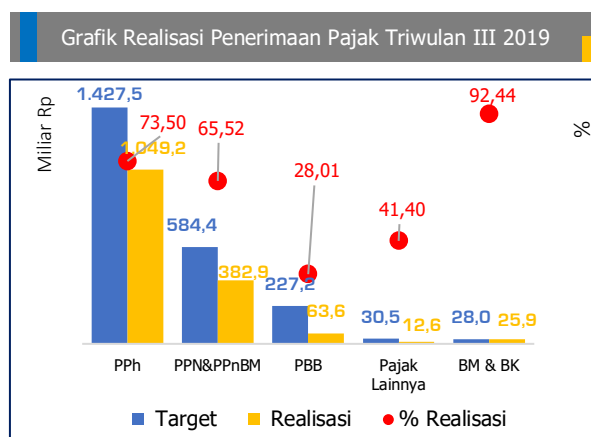
URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
A. Pendapatan dan Hibah	2,652.0	1,421.3	53.6%	2,502.9	1,690.1	67.5%
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,652.0	1,421.3	53.6%	2,502.9	1,690.1	67.5%
1. Penerimaan Perpajakan	2,490.2	1,288.9	51.7%	2,356.7	1,534.3	65.1%
a. Pajak Dalam Negeri	2,474.1	1,258.2	50.8%	2,328.7	1,508.8	64.8%
b. Pajak Perdagangan Int.	16.1	30.6	190.0%	28.0	25.5	91.1%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	137.5	132.4	96.3%	146.2	155.8	106.6%
a. PNBP Lainnya	137.3	107.1	78.0%	99.5	127.3	127.9%
b. Pendapatan BLU	0.2	25.3	12,657.4%	46.7	28.5	61.1%
B. Belanja Negara	9,800.4	6,591.5	67.3%	11,085.5	7,081.2	63.9%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,460.6	1,824.6	52.7%	4,232.6	2,128.6	50.3%
1. Belanja Pegawai	655.2	450.9	68.8%	882.6	534.3	60.5%
2. Belanja Barang	1,107.5	579.9	52.4%	1,298.9	793.0	61.0%
3. Belanja Modal	1,691.6	793.0	46.8%	2,046.1	800.7	39.1%
4. Bantuan Sosial	6.3	0.68	10.7%	5.0	0.6	13.0%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	6,339.8	4,766.9	75.2%	6,852.7	4,952.6	72.3%
1. Transfer ke Daerah	5,957.4	4,534.4	76.2%	6,389.5	4,675.1	73.2%
a. Dana Bagi Hasil	1,127.4	717.8	63.7%	1,405.7	913.5	65.0%
i. Dana Bagi Hasil Pajak	387.2	241.6	62.4%	413.6	254.6	61.5%
ii. Dana Bagi Hasil SDA	740.2	476.2	64.3%	992.1	658.9	66.4%
b. Dana Alokasi Umum	3,709.6	3,089.3	83.3%	3,857.3	3,216.6	83.4%
c. DAK Fisik	656.2	418.1	63.7%	665.3	274.4	41.3%
d. Dana Insentif Daerah	69.5	51.9	74.6%	-	-	-
f. DAK Non Fisik	356.7	224.1	66.1%	461.3	270.6	58.7%
2. Dana Desa	387.6	232.5	60.0%	463.3	277.5	59.9%
D. Surplus/Defisit Anggaran	(7,148)	(5,170)	72.3%	(8,582)	(5,391)	62.8%

Sumber : Kanwil DJP Kaltim, Kanwil DJBC Kalbagtim, OM SPAN dan SIMTRADA, diolah.

Kinerja realisasi pendapatan mengalami perbaikan dibandingkan tahun yang lalu, sedangkan realisasi belanja pemerintah belum ideal.

A. Pendapatan Negara

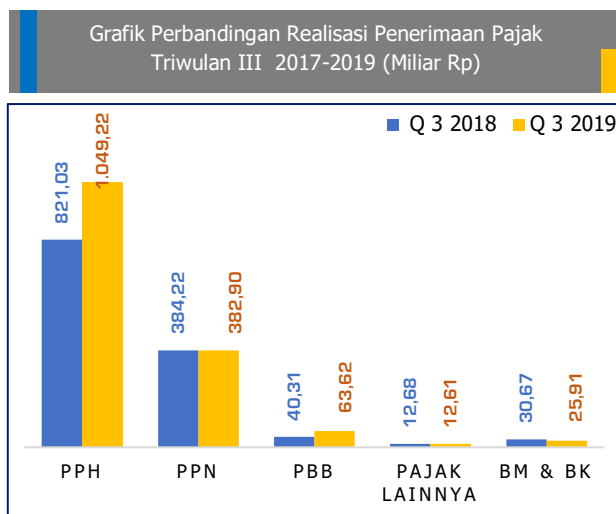
1. Penerimaan Perpajakan



Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara & Kanwil DJBC

Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi penerimaan pajak di regional Kalimantan Utara tercatat Rp1.534,3 miliar, terjadi peningkatan dibandingkan penerimaan di periode yang sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp1.288,9 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, capaian penerimaan perpajakan pada periode ini juga mengalami peningkatan secara persentase terhadap target, dimana capaian

pada triwulan III tahun 2018 yang tercatat sebesar 51,7 persen meningkat menjadi 65,1 persen pada triwulan III tahun 2019. Walaupun target di tahun 2018 lebih tinggi dari tahun ini tapi secara nominal mengalami kenaikan yang sampai di akhir tahun anggaran 2019. PPh dan PPN masih menjadi kontributor utama realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan akhir periode laporan, penerimaan PPh mencapai 73,5persen dari target atau setara Rp1.049,22 miliar. Realisasi PPN mencapai 65,5persen atau sebesar Rp382,9 miliar. Persentase realisasi penerimaan pajak tertinggi tercatat pada jenis Pajak Perdagangan Internasional yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar yang berhasil tercapai sebesar 92,4 persen dari target.



Sumber : Kanwil DJP Kaltimlara & Kanwil DJBC Kalbagtim

Jika dilihat tren realisasi triwulan III dalam kurun waktu 2018 - 2019, maka secara umum capaian pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak namun berbeda kondisi pada triwulan II tahun 2019 yang hampir seluruh jenis pajak mengalami penigkatan, tapi pada triwulan III ini terdapat 3 jenis pajak yang mengalami penurunan jika

dibandingkan secara q to q dengan tahun 2018, pajak yang mengalami penurunan tersebut PPN (Rp384,22 miliar - Rp382,90 miliar), Pajak Lainnya (Rp12,68 miliar - Rp12,61 miliar), dan Bea Masuk & Keluar (Rp30,67 miliar - Rp25,91 miliar).

Perhitungan total pajak tidak sama dengan yang disajikan dalam total pajak dalam negeri, karena dalam penyajian pajak perdaerah, perjenis pajak KPP sebagai penyedia hanya mencatat pajak yang berada dalam wilayah kerja KPP tersebut, tetapi angka yang tersaji dalam Pajak dalam Negeri merupakan total dari seluruh penerimaan pajak yang disetorkan di regional Kalimantan Utara.

a) Pajak Penghasilan

Realisasi penerimaan PPh pada triwulan III tahun 2019 tercatat Rp1.049,22 miliar (*I account* triwulan III 2019), naik cukup signifikan sebesar Rp228,19 miliar dari realisasi triwulan III tahun 2018 yang hanya sebesar Rp821,03 miliar. Peningkatan ini terlihat di setiap daerah, Kontributor terbesar PPh adalah Kota Tarakan sebesar Rp379,9miliar, Kabupaten Nunukan sebesar Rp141,1 miliar, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp133,9 miliar. Capaian realisasi yang berasal

dari ketiga Kabupaten/Kota ini menyumbang Rp654,9 miliar atau hampir 89,09persen dari total realisasi PPh.

b) Pajak Pertambahan Nilai

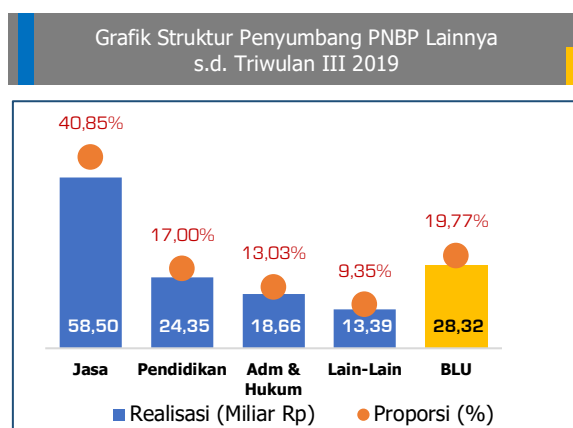
Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada triwulan III tahun 2019 mencapai Rp382.9 miliar, mengalami sedikit penurunan sebesar Rp1,32 miliar atau sebesar 2,45 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan merupakan 2 wilayah yang menjadi kontributor terbesar yang ditahun sebelumnya Kab. Nunukan yang menempati urutan kedua, besaran di triwulan III 2019 ini masing-masing sebesar Rp183,47 miliar dan Rp77,18 miliar.

Realisasi yang tercatat sampai dengan tanggal 30 September 2019 berdasarkan data yang bersumber dari Kanwil DJP Kaltimara, termasuk di dalamnya realisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp284,35 juta.

c) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada triwulan III tahun 2019 tercatat sebesar Rp25,91 miliar atau 92,44 persen dari target tahun 2019. Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp18,47 miliar dan Bea Keluar senilai Rp7,04 miliar. Capaian realisasi ini baik secara nominal maupun persen realisasi terhadap target mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Dan penghasilan tersebut dicatatkan pada 2 daerah saja di Kalimantan Utara yaitu Kota Tarakan dan Kab. Nunukan berdasarkan data per 30 September 2019 dari Kanwil DJBC Kalbagtim.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Sumber : OMSPAN, diunduh 5 Agustus 2018

Realisasi PNBP di triwulan III tahun 2019 ini mencapai Rp49,85 miliar, meningkat 14,57 persen atau sebesar Rp6,33 miliar dari realisasi PNBP periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp43,52 miliar. PNBP yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu PNBP Lainnya dan PNBP

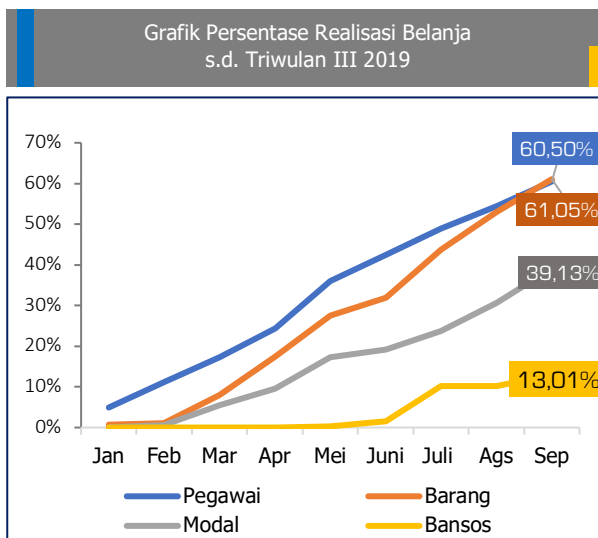
Badan Layanan Umum. Sedangkan jenis PNBP Sumber Daya Alam dan PNBP Laba BUMN seluruhnya disetorkan dan tercatat secara terpusat.

Mayoritas PNBP Lainnya bersumber dari Pendapatan Jasa yang sampai dengan 30 September 2019 terealisasi sebesar Rp58,50 miliar serta mencatatkan kontribusi sebesar 37,55 persen terhadap total realisasi PNBP. Adapun realisasi PNBP lain-lain yang terhimpun sebesar Rp12,57 miliar terdiri dari pendapatan bunga, penjualan BMN, denda, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu, pada triwulan III tahun 2019, sudah terdapat pengesahan transaksi BLU yang ditandai dengan adanya realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum pada Bandar Udara Juwata senilai Rp28,32 miliar.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat



Sumber : Data Realisasi Belanja per wilayah, OM SPAN

Tingkat persentase realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 September 2019 secara keseluruhan masih berada pada level 50,3 persen. Kinerja realisasi belanja tercatat hampir sama dengan periode yang sama di tahun 2018 kecuali pada jenis belanja pegawai dan belanja modal sedikit mengalami penurunan. Sampai dengan akhir triwulan III 2019, belanja pegawai

yang sudah direalisasikan mencapai 60,50 persen dari pagu. Tingginya realisasi belanja pegawai tersebut sesuai dengan karakter belanja pegawai yang relatif konstan setiap bulannya serta bersifat alamiah setiap bulan sudah ada pengeluaran yang bersifat tetap.

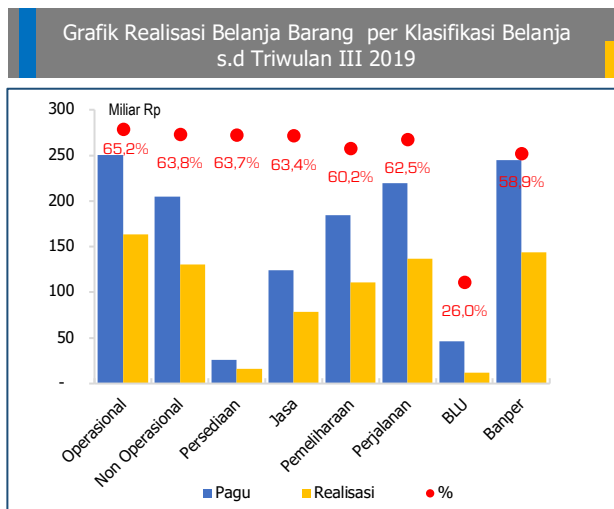
Posisi kedua tercatat pada belanja barang yang sampai dengan akhir periode pelaporan mencapai 61,05 persen. Capaian ini juga relatif dipengaruhi oleh karakter pencairan belanja barang khususnya untuk membiayai kebutuhan operasional kantor sejak awal tahun anggaran.

Adapun belanja modal mencatatkan realisasi yang agak menurun, yaitu hanya sebesar 39,13 persen. Secara persentase, realisasi Belanja Modal turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 46,8 persen. Akan tetapi secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, hal ini

dikarenakan Pagu belanja modal mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp1,7 triliun di 2018 menjadi Rp2,1 triliun pada tahun ini. Dan diharapkan pada akhir tahun anggaran persentase realisasi dapat melebihi tahun lalu yang mencapai 90,3 persen.

Keseluruhan belanja jika dilihat dari jenis belanja masih sama dengan tahun lalu, belum ada pencapaian yang signifikan

a) Belanja Barang



Sumber : Diolah dari data Monev PA ,Diunduh Tanggal 10 November 2019

Pagu terbesar belanja barang diperuntukkan untuk belanja operasional yang mencapai Rp250,2 miliar, dengan angka realisasi sebesar Rp163,1 miliar atau 65,2 persen dari pagu. Belanja barang dengan alokasi paling kecil adalah belanja barang Persediaan yang hanya sebesar Rp25,8 miliar.

Belanja perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai

perjalanan dinas ASN tercatat sebesar Rp219,4 miliar, lebih tinggi dibandingkan alokasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bantuan Pemerintah.

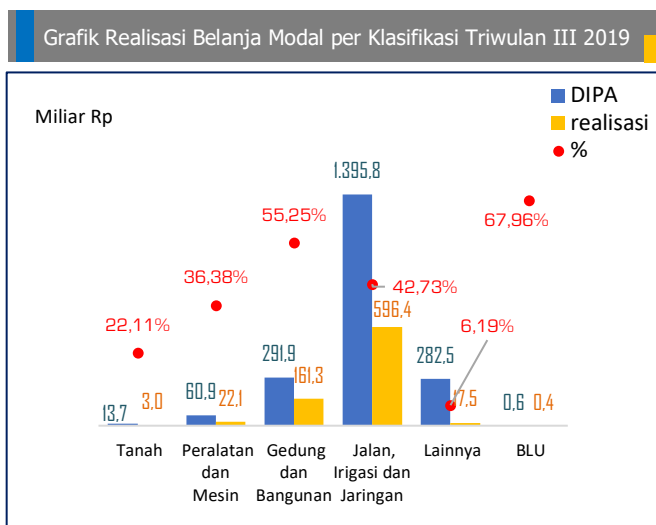
Perubahan Pagu terjadi di triwulan ke III 2019 ini terjadi karena banyak terjadi revisi pergeseran baik internal satker maupun antar satker yang masih di eselon I yang sama, secara total Pagu belanja Barang Triwulan III meningkat dari Triwulan II tahun 2019.

b) Belanja Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada tahun 2019 ini disalurkan melalui 13 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp244,6 miliar. Alokasi terbesar berasal dari Satker lingkup Kementerian PU-Pera yang mencapai Rp209,7 miliar, disusul kemudian satker lingkup Kementerian Pertanian sebesar Rp19,3 miliar dan satker lingkup Kementerian Desa PDTT sebesar Rp7,5 miliar. Hingga akhir triwulan III tahun 2019, realisasi belanja bantuan pemerintah mencapai Rp144,01 miliar atau sebesar 58,88 persen dari pagu

c) Belanja Modal

Belanja modal terbesar dialokasikan untuk keperluan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp1,39 triliun atau 68,24 persen dari total belanja modal. Sampai dengan akhir periode laporan, realisasi belanja ini mencapai Rp596,38 miliar atau 42,73 persen dari pagunya. Alokasi dana yang sangat besar tersebut sebagian besar atau mencapai 68,24 persen merupakan program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Utara dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara. Program pembangunan jalan khususnya di wilayah perbatasan.



Sumber : Monev PA (olah data)
 diunduh tanggal 10 November 2019

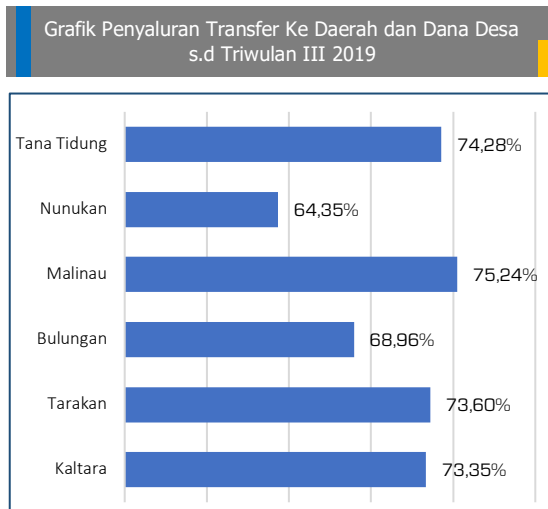
Alokasi belanja modal terbesar kedua adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai Rp291,88 miliar. Sampai dengan akhir triwulan III 2019 realisasi belanja ini baru mencapai Rp161,25 miliar atau 55,25 persen dari pagu . Alokasi untuk Gedung dan Bangunan diprioritaskan karena sebagai penunjang

pelayanan publik oleh kantor-kantor vertikal yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang notabene merupakan provinsi termuda dengan kebutuhan percepatan penyediaan infrastruktur publik. Belanja Modal lainnya juga tidak kalah besar untuk alokasinya yaitu sebesar Rp282,50 miliar yang sebagian besar digunakan untuk renovasi aset tetap baik gedung, jalan, jaringan dan sebagainya yang diserahkan ke Pemerintah Daerah, dalam rangka pembenahan infrastruktur yang menjadi pengelolaan aset daerah.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan tanggal 30 September 2019 secara rata-rata realisasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai 71.63 persen. Realisasi tertinggi tercatat ke Kab. Malinau sebesar 74,28 persen sedangkan realisasi terendah berada di Kab. Nunukan sebesar 64,35 persen.

Nunukan menjadi yang terendah dalam penyerapan TKDD dan Dana Desa diakibatkan karena persentase penyerapan DAK Fisik per 30 September baru



Sumber : Aplikasi SIMTRADA DJPK dan OM SPAN, diunduh 10 November 2019

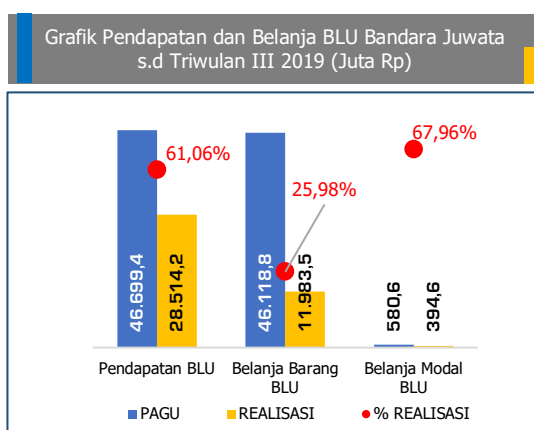
mencapai 24,16 persen, hal ini dikarenakan pencairan khususnya Kab. Nunukan baru tersalur pada bulan Oktober sesuai batas akhir pencairan DAK fisik Tahap II yaitu tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan untuk Dana Desa di Kab. Nunukan terdapat 1 (satu) Desa yang tidak salur di penyaluran tahap II dikarenakan ada permasalahan hukum yang

menimpa Kepala Desa nya.

Secara keseluruhan untuk TKDD dan Dana Desa di Lingkup Prov. Kalimantan Utara masih sesuai dengan harapan dan perencanaan baik penyaluran maupun pelaksanaannya

3. Pengelolaan BLU

Sama halnya dengan kondisi pada akhir triwulan III tahun lalu pada periode pelaporan, Bandara Udara Juwata Tarakan merupakan satu-satunya satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Kalimantan Utara.



Sumber : Aplikasi E-Rekon LK dan Monev PA, diunduh 10 November 2019

Berdasarkan pengesahan pendapatan dan belanja sampai dengan akhir triwulan III tahun 2019, realisasi pendapatan BLU tercatat sebesar 61,06 persen dari target atau senilai Rp28,51 miliar. Mayoritas dari realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Jasa Bandar Udara yang mencapai Rp28,32 miliar sedangkan sisanya

merupakan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Kepelabuhanan dan Kenavigasian. Sedangkan untuk belanja BLU baru dilakukan pengesahan

Belanja Barang sebesar Rp11,98 miliar atau sebesar 25,98 persen dari pagu dan Belanja Modal sebesar Rp395 juta atau sebesar 67,96 persen dari Pagu.

C. Prognosis Realisasi APBN

Kebijakan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan proyeksi realisasi pendapatan dan belanja. Kebijakan APBN Tahun Anggaran 2019 yang fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia setelah sebelumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berdampak terhadap penyerapan dan penggunaan APBN yang lebih baik dan tepat sasaran.

Pemberlakuan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan munculnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada masing-masing kementerian dan Lembaga akan memicu untuk setiap pengguna anggaran memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran secara lebih tepat, akurat dan akuntabel.

Disamping itu, untuk memperoleh prognosis yang relatif mendekati kenyataan, maka beberapa hal lain juga telah dipertimbangkan dan diperhitungkan, antara lain:

- 1) Data historis/statistik capaian realisasi dan tren penerimaan.
- 2) Instruksi langkah-langkah strategis pelaksanaan APBN 2019.
- 3) Perkiraan realisasi belanja berdasarkan data ADK kontrak yang telah diterima KPPN.
- 4) Data kontrak / rencana kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan ke KPPN.
- 5) Potensi kenaikan/penurunan alokasi dana Transfer ke Daerah apabila pemerintah menetapkan kebijakan APBN-P sebagai dampak penyesuaian indikator-indikator atas asumsi makro yang tidak sesuai perkiraan sampai dengan triwulan III 2019.

Tabel Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2019

URAIAN	PAGU (Miliar Rp)	Realisasi s.d. Triwulan III 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2019	
		Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU	Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU
Pendapatan Negara	2,502.9	1,690.1	67,50%	2.750,44	91%
Belanja Negara	11,085.5	7,081.2	63,92%	10.642,08	96%
<i>Surplus/Defisit</i>	<i>(8.582,60)</i>	<i>(5.391,10)</i>		<i>(7.891,64)</i>	

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Hingga akhir Triwulan III 2019 *pendapatan daerah yang terealisasi secara agregat mencapai Rp5,7triliun atau 70,2 persen dari target*. Tingkat realisasi pada periode ini, secara persentase mengalami sedikit peningkatan dari periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 70,1 persen.

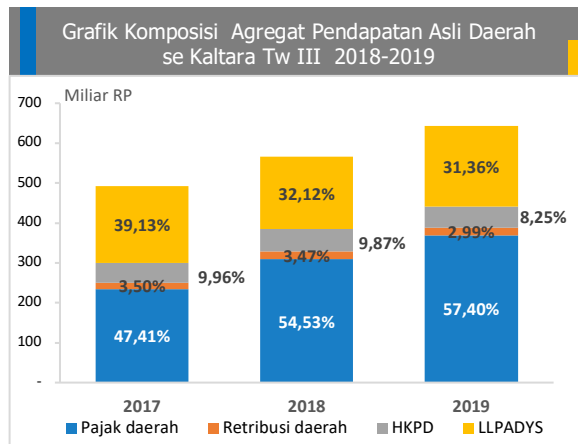
Pada periode yang sama, *alokasi belanja dan transfer seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara terealisasi sebesar Rp4,3 triliun atau 48,8 persen dari pagu*. Capaian ini sedikit lebih baik dibandingkan Triwulan III tahun lalu yang terealisasi 48,4 persen.

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Triwulan III 2018-2019 (Miliar Rp)							
URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019			%↑↓ Nominal Realisasi
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
PENDAPATAN	7.655,5	5.368,3	70,1%	8.213,9	5.767,1	70,2%	7,4%
PAD	851,3	566,3	66,5%	964,3	643,2	66,7%	13,6%
Pajak daerah	433,8	308,8	71,2%	506,7	369,2	72,9%	19,5%
Retribusi daerah	48,3	19,7	40,7%	52,3	19,3	36,8%	-2,1%
Hasil Pengelolaan KD yang dipisahkan	48,7	55,9	114,9%	59,2	53,1	89,7%	-5,0%
Lain-lain PAD yang sah	320,6	181,9	56,7%	346,2	201,7	58,3%	10,9%
Pendapatan Transfer	6.743,2	4.776,3	70,8%	7.033,2	5.093,9	72,4%	6,7%
Transfer Pemerintah Pusat	6.458,0	4.642,3	71,9%	6.829,2	4.945,5	72,4%	6,5%
Dana Bagi Hasil Pajak	452,6	219,4	48,5%	621,3	254,6	41,0%	16,0%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	774,9	476,2	61,5%	825,0	653,4	79,2%	37,2%
Dana Alokasi Umum	3.709,6	3.010,6	81,2%	3.857,3	3.216,6	83,4%	6,8%
Dana Alokasi Khusus	1.063,8	650,2	61,1%	1.062,2	543,4	51,2%	-16,4%
Dana Insentif Daerah	69,5	51,9	74,6%	-	-	#DIV/0!	-100,0%
Dana Desa	387,5	234,1	60,4%	463,3	277,5	59,9%	18,5%
Transfer Pemerintah Provinsi	169,0	97,8	57,9%	189,5	132,1	69,7%	35,1%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169,0	96,1	56,9%	189,5	130,2	68,7%	35,5%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	1,7		-	1,9		11,5%
Transfer Bantuan Keuangan	116,3	36,1	31,1%	14,5	16,3	112,6%	-54,8%
Lain-lain Pendapatan yang sah	61,0	25,8	42,3%	216,4	30,0	13,9%	16,5%
Pendapatan Hibah	27,6	14,0	50,5%	61,9	16,1	26,0%	15,3%
Pendapatan Dana Darurat	0,0	-		-	-	#DIV/0!	
Pendapatan Lainnya	33,3	11,8	35,4%	154,5	13,9	9,0%	17,9%
BELANJA	7.826,6	3.752,8	47,9%	7.674,3	3.655,6	47,6%	-2,6%
Belanja Operasi	5.377,8	3.026,9	56,3%	5.478,9	3.172,6	57,9%	4,8%
Belanja Pegawai	2.884,2	1.830,7	63,5%	2.593,3	1.860,8	71,8%	1,6%
Belanja Barang	2.078,3	981,7	47,2%	2.459,8	1.128,2	45,9%	14,9%
Belanja Bunga	7,2	-	0,0%	19,0	-	0,0%	
Belanja Subsidi	35,7	13,7	38,2%	35,9	17,4	48,3%	27,2%
Belanja Hibah	356,0	200,1	56,2%	360,9	160,9	44,6%	-19,6%
Belanja Bantuan Sosial	16,4	0,7	4,3%	10,0	5,3	53,4%	650,8%
Belanja Modal	2.434,9	725,9	29,8%	2.180,1	482,2	22,1%	-33,6%
Belanja tidak terduga	14,0	-	0,0%	15,3	0,8	5,4%	#DIV/0!
Transfer Bagi Hasil	133,9	107,8	80,5%	181,1	132,1	73,0%	22,6%
Transfer Bantuan Keuangan	909,1	432,2	47,5%	981,6	521,5	53,1%	20,7%
BELANJA dan TRANSFER	8.869,7	4.292,8	48,4%	8.837,0	4.309,2	48,8%	0,4%
SURPLUS/DEFISIT	(1.214,2)	1.075,5	-88,6%	(623,1)	1.457,9	-234,0%	35,6%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada Triwulan III 2019, realisasi PAD mencapai Rp643,2 miliar atau 66,7 persen dari target. Baik secara persentase terhadap targetnya maupun secara nominal, realisasi tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari Pajak

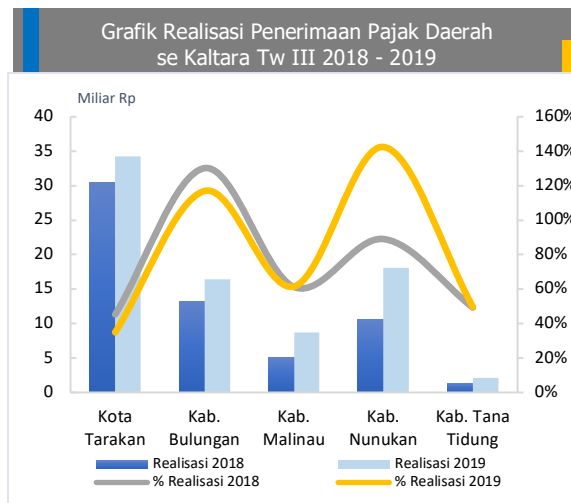
Daerah sebesar Rp369,2 miliar, sedangkan komponen dengan nominal realisasi terendah berasal dari Retribusi Daerah sebesar Rp19,3 miliar. Sementara komponen yang mencatatkan tingkat persentase realisasi terhadap pagu yang tertinggi yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan persentase sebesar 89,7 persen. Sementara Retribusi Daerah selain mencatatkan nominal yang terendah juga mencatatkan tingkat persen realisasi terhadap pagu yang terendah yaitu hanya sebesar 36,8 persen dari target.

Grafik diatas menunjukkan komposisi PAD mengalami perubahan kontribusi dari Triwulan III tahun 2018 ke periode saat ini. Komponen Pajak Daerah mengalami peningkatan kontribusi sedangkan tiga komponen lainnya yaitu Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami sebaliknya.

Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara merealisasikan target PAD dengan cukup optimal, hal ini ditandai dengan meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan (11,15 %) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 (10,55 %).

Hal ini bisa dikatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah dengan cara terus mendorong optimalisasi pungutan pajak daerah yang salah satunya dengan intensifikasi pungutan pajak, seperti menagih tunggakan pajak, pendekatan pelayanan publik dengan membuat Samsat *Payment Point* dan Samsat Keliling berpengaruh cukup signifikan terhadap kontribusi PAD terhadap nominal Pendapatan. Selain itu, saat ini Pemda masih gencar dalam meningkatkan iklim investasi daerah yang dinilai dapat mendorong peningkatan PAD.

a) *Penerimaan Pajak Daerah*



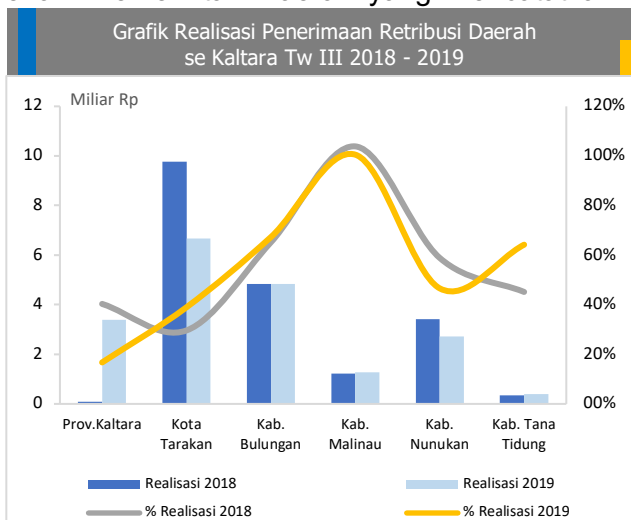
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Total Pajak Daerah yang terhimpun sampai dengan Triwulan III tahun 2019 sebesar Rp369,2 miliar atau mencapai 72,9 persen dari target. Sebesar Rp289,57 miliar atau 78,4 persen dari total realisasi pajak daerah bersumber dari Pemprov Kalimantan Utara. Namun secara persentase realisasi terhadap target, capaian tertinggi dicatatkan Kabupaten Nunukan sebesar 142,5 persen. Jika sumber pajak daerah tidak

memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Utara, maka daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Kota Tarakan atau 9,3 persen dari total realisasi pajak daerah.

b) *Penerimaan Retribusi Daerah*

Sampai dengan akhir bulan September 2019, realisasi di seluruh Pemerintah Daerah se Kalimantan Utara mencapai Rp19,3 miliar atau sebesar 36,8 persen dari target. Dari enam Pemerintah Daerah yang mencatatkan kenaikan nominal realisasi dibanding

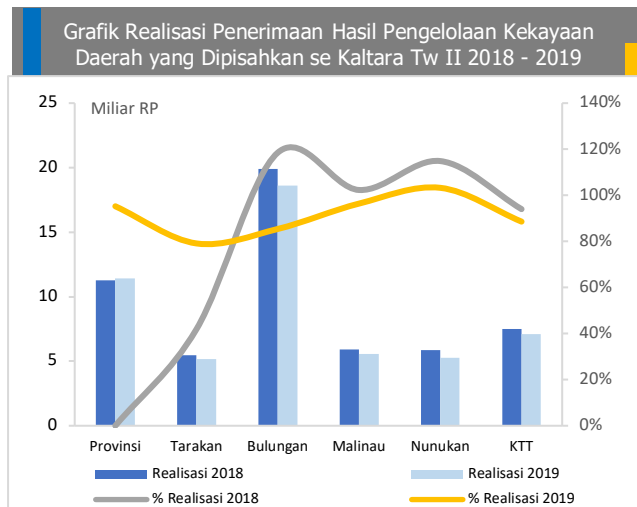


Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

periode yang sama tahun lalu ada tiga Pemerintah Daerah yaitu, Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan tiga daerah lainnya mencatatkan penurunan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu, dan yang cukup signifikan penurunannya adalah Kota Tarakan.

Untuk nominal realisasi terbesar tercatat di wilayah Kota Tarakan sebesar Rp6,6 miliar. Hal ini sangat wajar karena sebagian besar aktifitas perekonomian yang dikenakan retribusi daerah berlokasi di wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Tarakan.

c) *Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

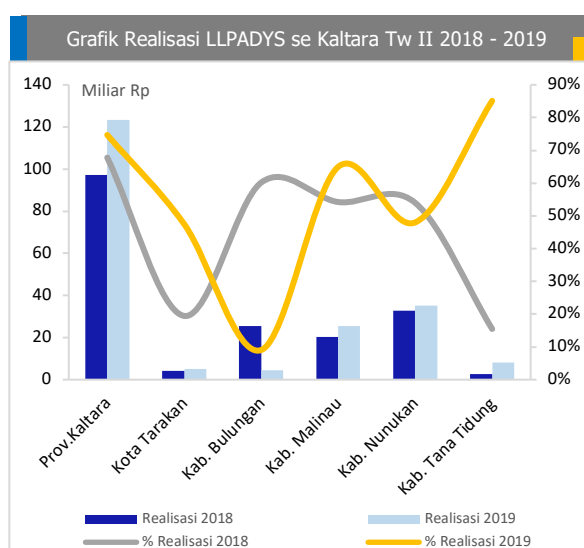


Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada akhir Triwulan III 2019, Rerata capaian realisasi untuk seluruh daerah adalah 91,3 persen. Bahkan ada Pemda yang telah melampaui target yaitu Kabupaten Nunukan. Daerah dengan kontribusi terbesar atas penerimaan ini adalah Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang masing-masing

mencapai Rp18,6 miliar atau 35,07 persen untuk Kabupaten Bulungan dari keseluruhan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercatat sebesar Rp53,1 miliar dan untuk Provinsi Kalimantan Utara penerimaan tercatat sebesar Rp11,42 miliar atau 21,5 persen dari keseluruhan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kondisi ini tidak terlepas dari nilai penyertaan modal yang relatif besar di sejumlah BUMD, sehingga penerimaan dividen juga lebih besar dibanding Pemda lainnya di Kalimantan Utara.

d) *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (LLPADYS)*



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

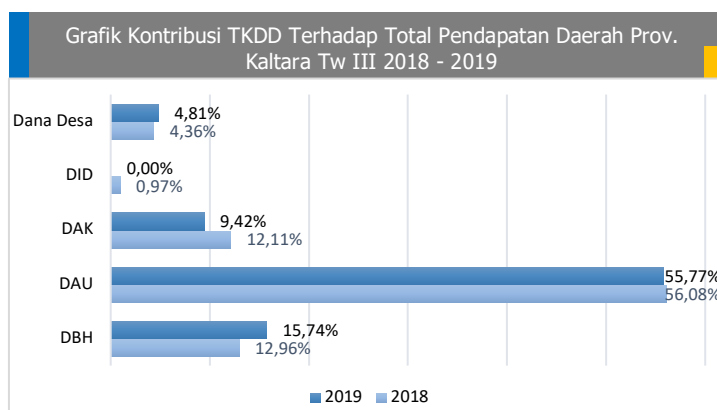
Secara agregat, penerimaan LLPADYS regional Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan mencapai 58,3 persen dari target atau sebesar Rp201,7 miliar. Komponen PAD ini secara umum menunjukkan tren peningkatan hampir diseluruh pemda, kecuali Kabupaten Bulungan yang tercatat mengalami penurunan realisasi.

Nominal realisasi pada Triwulan III 2019 di Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan persentase peningkatan yang mencapai 210,1 persen. Berbanding terbalik dengan pencapaian Kabupaten Bulungan yang mencatatkan penurunan nominal realisasi sebesar 82,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 72,4 persen dari pagu atau sebesar Rp5,09 triliun. Capaian ini menunjukkan perbaikan pada nominal realisasi jika dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp4,77 triliun. Jika ditinjau per jenis Transfer, secara rata-rata terealisasi 68,7 persen, dimana jenis Transfer Pemerintah Pusat mencatatkan tingkat realisasi tertinggi sebesar 72,4 persen.

Sumber Pendapatan Transfer secara nominal mayoritas berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp4,94 triliun atau 97,1 persen sedangkan sisanya adalah Transfer/Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

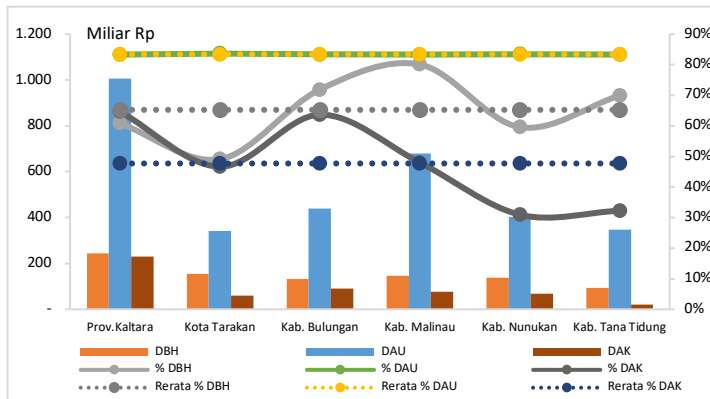


Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kontribusi realisasi Transfer Pemerintah Pusat terhadap total realisasi Pendapatan Daerah di regional ini menunjukkan ada peningkatan hanya di jenis transfer DBH dan Dana Desa.

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh alokasi Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami peningkatan di Tahun Anggaran 2019 kecuali untuk komponen Dana Alokasi Khusus (Non Fisik). Kemudian dapat dilihat juga bahwa pada tahun ini Pemda se-Kaltara tidak mendapatkan alokasi DID, namun pada Tahun Anggaran 2020 empat Pemda (Pemprov, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung) akan mendapatkan alokasi DID atas *reward* pencapaiannya meraih opini WTP dari BPK atas penyusunan LKPD TA 2018.

Grafik Realisasi Penerimaan Transfer Pempus Tw III 2018 - 2019



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Berdasarkan rincian jenisnya, rata-rata realisasi DBH mencapai 65,24 persen sedangkan DAU mencapai 83,41 persen dari target. Tingkat realisasi yang tidak ideal tercatat hanya pada jenis DAK yang rata-rata baru mencapai 47,7 persen dari target.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)

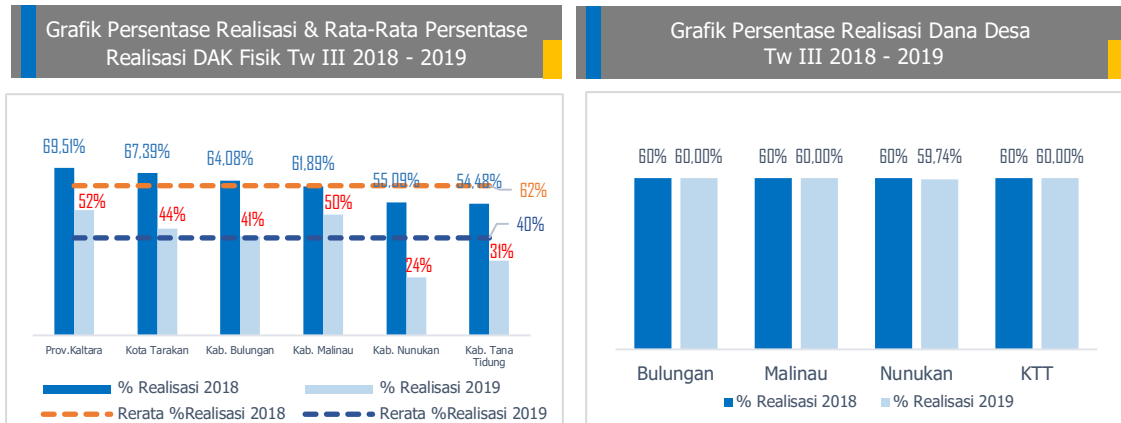
Data Pagu LLPDYS Triwulan III 2018-2019

PEMDA	Pagu 2018	Realisasi 2018	% Realisasi 2018	Pagu 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019
Prov. Kaltara	1.053.766.331	1.008.860.000	95,7%	43.211.636.851	596.370.000	1,4%
Kota Tarakan	30.569.680.000	5.270.240.000	17,2%	36.569.680.000	15.483.840.000	42,3%
Kab. Bulungan	22.084.514.054	12.941.240.000	58,6%	86.420.532.054	-	0,0%
Kab. Malinau	0	-	0,0%	13.455.400.000	-	0,0%
Kab. Nunukan	4.500.000.000	6.532.058.403	145,2%	29.492.100.000	13.916.400.000	47,2%
Kab. TanaTidung	2.724.395.760	-	0,0%	7.293.768.783	-	0,0%

Pada Triwulan III 2019, nominal realisasi tertinggi dicapai Kota Tarakan sebesar Rp15,48 miliar atau 42,3 persen dari target. Sedangkan secara persentase realisasi terhadap target yang tertinggi tercatat di Kabupaten Nunukan sebesar Rp512 juta atau 47,2 persen dari target. Keseluruhan daerah tercatat menetapkan pagu target penerimaan cukup optimistis dibandingkan target tahun lalu dima terlihat cukup signifikan peningkatan nominal pagu penerimaannya kecuali Kota Tarakan yang hanya menaikkan sekitar 20 persen dari target penerimaan tahun lalu.

DAK Fisik dan Dana Desa

Tingkat persentase penyaluran DAK Fisik terhadap alokasi secara agregat di Kalimantan Utara turun dari 63,70% di triwulan III tahun 2018 menjadi 41,25% di triwulan III 2019. Rata-rata penyerapan DAK Fisik tercatat sebesar 62,1 persen di triwulan III tahun 2018 turun menjadi 40,4 persen di triwulan III 2019.



Sumber : OM SPAN (diolah)

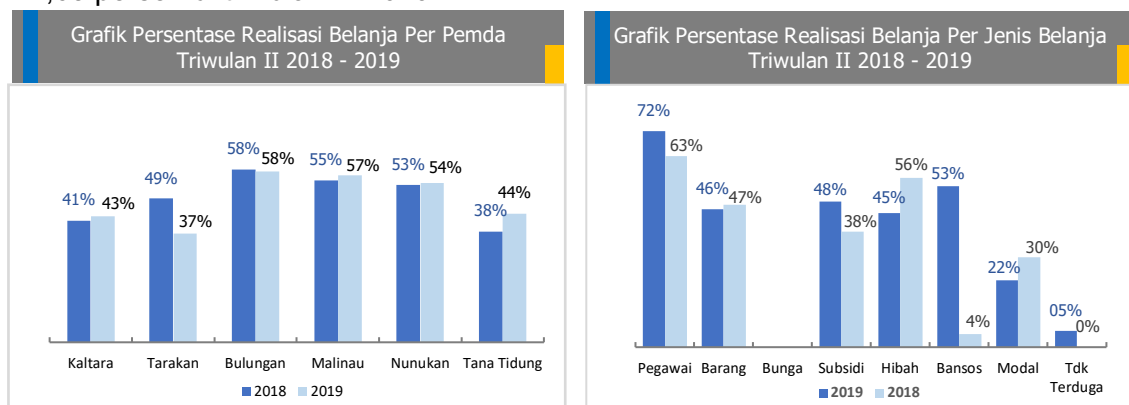
Penurunan tingkat penyerapan DAK Fisik tersebut terjadi di seluruh Pemerintah Daerah, dimana untuk Tana Tidung dan Nunukan bahkan mencatatkan realisasi dibawah rata-rata. Sesuai dengan regulasi pengelolaan DAK Fisik, akhir triwulan III merupakan periode menjelang batas akhir (21 Oktober) Pemerintah Daerah memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik Tahap II sebesar 45% dari alokasi untuk nilai alokasi DAK di atas satu miliar, dan DAK Fisik dengan nilai alokasi paling banyak satu miliar sebesar total nilai kontrak kegiatan. Adanya perubahan kebijakan syarat penyaluran yang dimulai pada tahun 2019 yakni dipersyaratkannya revidi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik tahun/tahap sebelumnya oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdampak terhadap penurunan tingkat penyerapan DAK Fisik Tahun 2019 pada periode pelaporan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah tertunda dalam proses pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik karena alasan belum diperoleh persepsi yang seragam atas teknis pelaksanaan revidi oleh APIP. Selain itu di Kabupaten Nunukan yang mencatatkan persentase penyaluran terendah sebesar 24,2% dari alokasi juga dipengaruhi persepsi yang berbeda antara tim revidi dari APIP atas penilaian/pengujian Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik tahun/tahap sebelumnya.

Sementara untuk penyerapan Dana Desa, terlihat di semua wilayah hingga periode Triwulan III 2019 telah mendapat penyaluran sampai dengan tahap II. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang

Pengelolaan Dana Desa, batas akhir penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 60 persen dari alokasi paling lambat pada minggu ke-4 Juni. Jika ditinjau dari sisi persentase terhadap alokasi, hanya di Kabupaten Nunukan yang memperlihatkan persentase realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II tidak mencapai 60%. Hal tersebut dikarenakan terdapat sisa Dana Desa tahun 2018 di RKUD Kabupaten Nunukan sehingga penyaluran tahap II ditunda sebesar sisa tersebut.

B. Belanja Daerah

Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara tercatat sedikit menurun dari 47,95 persen di triwulan III 2018 menjadi 47,63 persen di triwulan III 2019.



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini bersumber dari Belanja Pegawai yang mencapai 71,8 persen dari pagu, disusul kemudian Belanja Bansos sebesar 53,4 persen. Tingkat penyerapan Belanja periode triwulan III 2019 ini dari seluruh pos Belanja mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu sejalan dengan tingginya penyerapan tercatat hanya pos Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Subsidi selain itu pos belanja yang lain mengalami penurunan persentase penyerapan pada periode ini dibandingkan dengan periode triwulan III 2018.

Mayoritas pemda selain Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, mengalami peningkatan persentase realisasi belanja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode pelaporan, kinerja realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Bulungan yang mencapai 57,9 persen. Sementara Kota Tarakan menjadi daerah dengan tingkat penyerapan belanja yang terendah sebesar 36,8 persen.

Realisasi Belanja secara keseluruhan yang belum optimal, sebagian besar dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Modal dikarenakan sebagian besar kegiatan masih

terlambat dalam proses awal pelelangan paket pekerjaan maupun pengadaan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan tema HUT ke-6 provinsi termuda Indonesia pada tahun 2019 ini yaitu *“Inovatif, Transparansi, Kerja Cepat, Kerja Cerdas Untuk Kalimantan Utara Terdepan”*.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran. Pada sisi pendapatan, PAD diperkirakan mengikuti pola realisasi 2 tahun terakhir yang tercatat 90 persen dan 93 persen. Pendapatan Transfer diperkirakan tidak mengalami perubahan atau bahkan cenderung mengalami sedikit kenaikan seiring dengan kenaikan target penerimaan perpajakan dalam UU APBN 2019, maka DBH Pajak juga akan bertambah. Selain itu prediksi kenaikan harga dan permintaan komoditas batu bara yang menjadi salah satu komoditas utama di regional ini maka DBH SDA pun berpotensi mengalami peningkatan realisasi penerimaan. Di sisi belanja, capaian realisasi 78 persen di tahun 2017 dan 85 persen di tahun 2018 menjadi salah satu pertimbangan utama penyusunan prognosis realisasi sampai akhir tahun 2019 yang diperkirakan realisasi belanja akan meningkat namun tidak terlalu signifikan dari capaian tahun 2018. Dengan adanya beberapa program prioritas nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di regional Kalimantan Utara dan terdapat beberapa kegiatan yang diproyeksikan akan terealisasi pasca triwulan III 2019 berakhir, namun melihat perkembangan realisasi sampai triwulan III 2019 masih belum optimal serta mempertimbangkan pula tren realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga berikut ini prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara s.d. Triwulan IV 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Miliar Rp	% Realisasi	Miliar Rp	% Realisasi
Pendapatan Daerah	8.213,9	5.767,1	70,2%	7.721,1	94%
Belanja Daerah	8.837,0	4.309,2	48,8%	7.971,0	90,2%
Surplus/Defisit	(623,1)	1.457,9	-234,0%	(249,9)	40,1%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Periode Triwulan III 2019

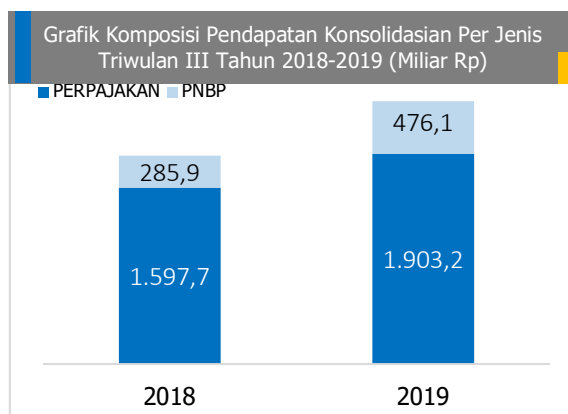
URAIAN	T.A. 2019				T.A. 2018
	Pusat (Miliar Rp)	Daerah (Miliar Rp)	Konsolidasian (Miliar Rp)	Kenaikan (%)	Konsolidasian (Miliar Rp)
PENDAPATAN NEGARA	1,689.88	5,635.01	2,379.36	26.32%	1,883.63
Penerimaan Perpajakan	1,534.09	369.15	1,903.24	19.12%	1,597.72
Penerimaan Negara Bukan Pajak	155.79	5,265.86	476.12	66.53%	285.91
BELANJA NEGARA	7,081.29	4,177.01	6,312.86	-1.82%	6,429.62
Belanja Pemerintah	2,128.69	3,655.64	5,784.33	-3.85%	6,015.75
Transfer	4,952.60	521.46	528.53	27.70%	413.87
SURPLUS (DEFISIT)	-5,391.42	1,457.91	-3,933.50	-13.47%	-4,545.98
PEMBIAYAAN	0.00	289.75	289.75	59.36%	181.82
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	313.25	313.25	54.07%	203.32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	23.50	23.50	9.30%	21.50
SILPA/SIKPA	-5,391.42	1,747.66	-3,643.76	-16.51%	-4,364.16

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Periode triwulan III 2019 menunjukkan realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Konsolidasian mengalami kenaikan dari Rp1,883.63 miliar pada triwulan III 2018 menjadi Rp2,379.36 miliar. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasi dari Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp1,689.88 miliar dan Pendapatan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp5.635,01 miliar. Realisasi Belanja Konsolidasian berbanding terbalik dengan realisasi Pendapatan Konsolidasian yang mengalami penurunan dari Rp6,429.62 miliar pada triwulan III 2018 menjadi Rp6.312,86 miliar di triwulan III 2019.

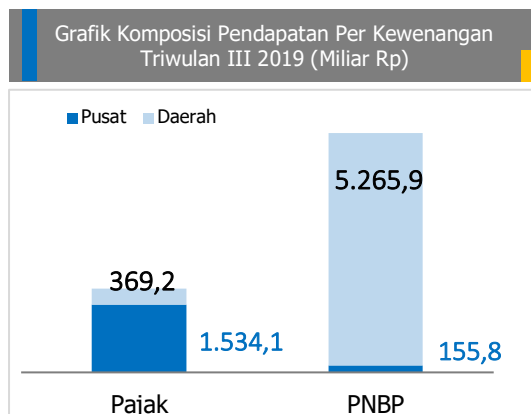
B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perpajakan pada triwulan III 2019 merupakan penyumbang terbesar pendapatan senilai

Rp1,930.2 miliar atau sebesar 79.99%, ini meningkat sebesar 19.12% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang menyumbang Rp1,597.7 miliar.



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Pada periode laporan, 80.60% Penerimaan Perpajakan Konsolidasian atau setara dengan Rp1,534.1 miliar berasal dari Pemerintah Pusat sementara 19.40% atau sebesar Rp369.2 miliar sisanya merupakan kontribusi pemerintah daerah. Realisasi PNBP secara akumulatif sebesar Rp5,421.65 miliar yang sebagian besar merupakan kontribusi PNBP pemerintah daerah dengan proporsi

persentase sebesar 97.13% atau senilai Rp5,265.86 miliar dan sisanya sebesar 2.87% atau senilai Rp155.8 miliar merupakan kontribusi Pemerintah Pusat.

2. Analisis Perubahan

Secara agregat Pendapatan Konsolidasian pada triwulan III 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Komponen Perpajakan mengalami kenaikan realisasi pada triwulan III 2019 sebesar 19.12% begitu pula komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 66.53%. Kondisi perekonomian di regional Kalimantan Utara yang terus bertumbuh dibanding periode sebelumnya turut mempengaruhi lonjakan realisasi Pendapatan Konsolidasian.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan III 2018-2019

URAIAN	TH 2018		TH 2019	
	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy
PERPAJAKAN	1.597,72	150.59	1.903,24	19.12%
PNBP	285,91	-47.70	476,12	66.53%
TOTAL	1.883,63	59.06	2.379,36	26.32%
PDRB ADHK	14,346.99	4.63	15,429.19	6.53%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

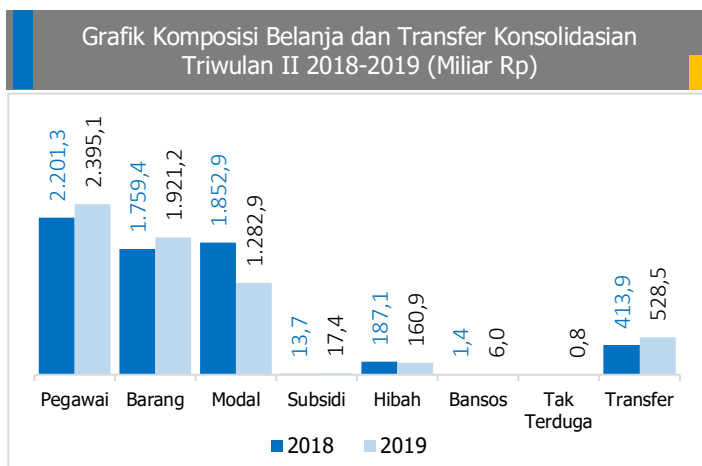
Pertumbuhan ekonomi di Triwulan III 2019 (yoy) yang tercatat sebesar 6.53% mengalami peningkatan pertumbuhan

dibandingkan kondisi di Triwulan III 2018 yang tumbuh sebesar 4.63%. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada periode pelaporan tersebut ternyata berkorelasi positif atau berbanding lurus dengan realisasi pendapatan konsolidasian. Aktivitas hampir seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan pada periode ini, kecuali pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 12.15%. Sebagai daerah yang masih baru Provinsi Kalimantan

Utara lebih berfokus untuk membangun sarana dan prasarana. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingginya pertumbuhan sektor lapangan konstruksi sehingga berdampak peningkatan PDRB. Hal ini menunjukkan kinerja perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara memberikan secercah harapan untuk lepas dari ketergantungan terhadap *nonrenewable resources*.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi Dan Perbandingan

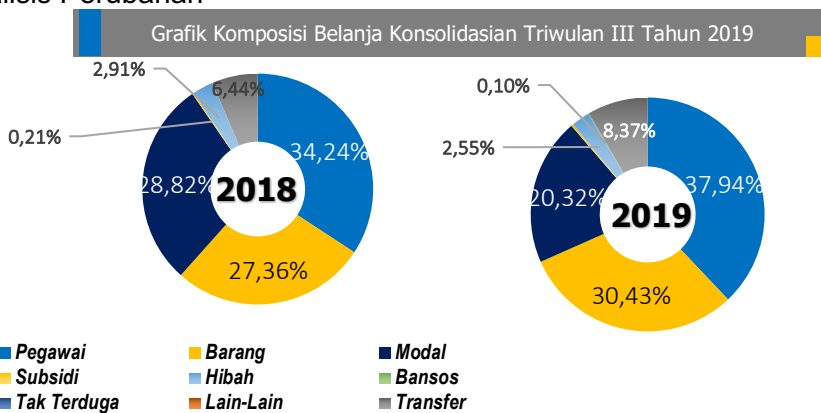


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Sebanyak 68.37% belanja pemerintah pada triwulan III tahun 2019 digunakan untuk belanja operasional, sementara dana yang digunakan untuk belanja modal hanya mencapai 20.32%. Rasio Belanja operasional terhadap belanja dan transfer konsolidasian mengalami

kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan rasio belanja modal mengalami penurunan. Kenaikan belanja operasional memberikan dampak pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan belanja belanja modal. Hal ini karena adanya perbedaan jangka waktu manfaat diantara kedua belanja tersebut. Belanja operasional akan memberikan dampak *instant/cepat* pada tahun itu juga dan belanja modal akan memberikan dampak besar di tahun-tahun mendatang.

2. Analisis Perubahan



Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Realisasi belanja pada triwulan III tahun 2019 masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai 37.94%. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan triwulan III tahun 2018 yang hanya mencapai 34.24% serta secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp193.77 miliar. Peningkatan ini juga terjadi pada persentase realisasi Belanja Barang. Realisasi Belanja Barang naik dari semula 27.36% menjadi 30.43%, sementara Belanja Modal mengalami penurunan dari 28.82% menjadi 20.32%. Realisasi belanja modal yang mengalami penurunan, dikarenakan sebagian besar proyek-proyek infrastruktur belum sampai pada tahap akhir (*on progress*). Salah satu indikatornya dapat dilihat dari penyaluran DAK Fisik yang banyak terjadi di menjelang *deadline*/batas waktu penyaluran selain itu juga dapat dilihat dari kegagalan salur DAK Fisik yang terjadi di Kalimantan Utara.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal dalam bentuk APBN dan APBD yang dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan triwulan III 2019 secara relatif cukup memberikan pengaruh dalam memberikan stimulasi pembentukan PDRB terutama pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada saat ini Kalimantan Utara melakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan simultan. Terdapat 3 (tiga) proyek pembangunan infrastruktur ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yaitu pembangunan PLTA, Kawasan Industri dan Pelabuhan yang turut memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB). Pertumbuhan PMTB pada Triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2.08% (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Komponen PMTB merupakan kontributor kedua terbesar dengan besaran 30.41% dari total pertumbuhan PDRB yang sebesar Rp 15,429.18 milyar. Sektor konstruksi ini merupakan sumber ekonomi potensial Kalimantan Utara di masa mendatang hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembangunan proyek-proyek strategis di Kalimantan Utara yang berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dalam pengertian luas, yang termasuk kemudahan investasi, pemberian berbagai jenis insentif perpajakan, pengurangan/pembebasan bea masuk dan atau bea keluar, diakui punya pengaruh terhadap pertumbuhan pada komponen Ekspor Barang dan Jasa (net ekspor antar daerah). Kegiatan ekspor pemerintah daerah pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan (*yoy*) sebesar 4.77% sedangkan untuk impor barang mengalami penurunan. komponen Ekspor Barang dan Jasa (net ekspor antar daerah) merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran dengan *source of growth* sebesar 2.89%.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan periode triwulan III tahun 2019, Belanja pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah mencapai Rp6,015.75 miliar, sementara itu investasi pemerintah senilai Rp1,864.84 miliar. Sementara itu PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan III tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp24,049.91 miliar.

Dengan demikian, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari belanja pemerintah adalah sebesar 25.01%, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya begitu pula dengan kontribusi dari investasi pemerintah yang tercatat sebesar 7.75% mengalami penurunan dibandingkan periode triwulan III 2018. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada investasi pemerintah.

Tabel Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB ADHB Triwulan III 2018-2019				
KOMPONEN PDRB	2018		2019	
	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi
BELANJA (G)	5,429.81	25.07	6,015.75	25.01%
INVESTASI (I)	1,852.88	8.56	1,864.84	7.75%
PDRB	21,655.77		24,049.91	

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH

Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah sehingga diprediksi dapat menjadi salah satu kawasan industri besar di Indonesia. Lazimnya provinsi di Pulau Kalimantan kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar perekonomian, tetapi sektor tersebut merupakan *nonrenewable resources* sehingga akan memiliki dampak negatif yang besar terhadap lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi perekonomian yang besar pada sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor tersebut belum “tergarap” secara optimal dikarenakan kendala yang ada dilapangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh kurangnya pasokan listrik di Provinsi Kalimantan Utara yang menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemerintah Pusat melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) pembangunan PLTA yang berada di sungai Kahayan dan pembangunan KIPI. PLTA tersebut akan dibangun sebanyak 5 bendungan dan menghasilkan 9000 megawatt serta menjadi PLTA terbesar di Asia Tenggara.

Pembangunan mega proyek strategis nasional akan memberikan *multiplier effect* yang positif terhadap pembangunan perekonomian di Kalimantan Utara pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. PT Inalum memilih Kalimantan Utara sebagai tempat investasi dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan PLTA dan KIPI sebagai proyek prioritas nasional. Hal ini dikarenakan PT Inalum membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar untuk melakukan ekspansi klaster industri alumunium.

Pembangunan PLTA yang terdiri dari 5 bendungan, pembangunan KIPI dan yang terakhir rencana Inalum untuk berekspansi ke Kalimantan Utara tentu akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di Kalimantan Utara. Pembangunan yang massif dan simultan akan berdampak langsung terhadap sektor konstruksi yang terus meningkat untuk beberapa tahun yang akan datang. Selain itu juga terbukanya lapangan kerja baru dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kalimantan Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara